LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) DIGITAL

MATA PELAJARAN SEJARAH

KELAS XI SEMESTER GENAP
PEMINATAN IPS

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Nomor Absen :

DAMPAK SERTA RESPONS BANGSA INDONESIA TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DALAM BIDANG POLITIK

Kompetensi Dasar

3.7 Menganalisis respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonianisme dalam bidang politik (organisasi pergerakan), ekonomi (bentuk perlawanan terhadap praktik monopoli), sosial-budaya (karya seni dan sastra), dan pendidikan (Taman Siswa, Kayu Tanam).

4.7 Menyajikan hasil analisis respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan dalam bentuk tulisan dan/atau media lain.

Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menelaah dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik.
2. Menyimpulkan respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik.

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu menelaah dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik.
2. Peserta didik mampu menyimpulkan respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik.

Ayo Mengamati Ringkasan Materi!

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperialisme diartikan sebagai sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Salah satu dampak imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat dalam bidang politik adalah runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Pemerintah kolonial juga melaksanakan politik adu domba (*Divide et Impera*) yang digunakan untuk memecah belah dan memperlemah kekuatan bangsa Indonesia.

Selain berkurangnya kekuasaan politik pribumi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap para penguasa lokal berkurang, pemerintah kolonial Belanda merombak struktur birokrasi kepada bentuk pemberlakuan konstitusi baru di tahun 1848. Berdasarkan konstitusi tersebut, wilayah Hindia Belanda (Indonesia) harus menyusun undang-undang pemerintahan, sistem keuangan, dan sistem audit yang disetujui oleh Majelis Perwakilan.

Seiring berubahnya sistem birokrasi dan pemerintahan pada masa kolonial, sistem hukum yang berlaku juga mengalami perubahan. Gubernur Jenderal Daendels merupakan peletak dasar perubahan sistem hukum tradisional menjadi sistem hukum modern model barat dan mengenalkan sistem pengadilan pribumi (*landgerecht*) di setiap wilayah (*perfektuure*).

Bangsa Indonesia yang mengalami banyak penderitaan akibat imperialisme dan kolonialisme kemudian mendirikan wadah perjuangan berbentuk organisasi pergerakan nasional yang berusaha memperbaiki keadaan rakyat. Organisasi-organisasi pergerakan memiliki strategi yang berbeda-beda. Ada yang mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, tetapi ada juga yang menolak. Hal ini sesuai dengan kondisi di setiap periode dan prisip dasar masing-masing organisasi bersangkutan.

Masa awal kebangkitan nasional yaitu tahun 1908 sampai tahun 1920, ditandai dengan munculnya berbagai organisasi massa yang berperan sebagai pendobrak lahirnya pergerakan, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Setelah Perang Dunia I, organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia mulai bersikap radikal, dengan ciri perjuangan berbentuk nonkooperasi. Periode ini semakin diperkuat dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Organisasi pergerakan pada masa ini diantaranya Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa ini banyak aktivis dan tokoh-tokoh yang dicekal lalu diasingkan oleh pemerintah kolonial. Untuk mengantisipasi hal tersebut organisasi-organisasi mulai mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Beberapa organisasi yang bersifat moderat ini adalah Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Ayo Mengerjakan Evaluasi!

PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara menekan jawaban tersebut.

1. Politik adu domba yang digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah dan memperlemah kekuatan bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan ....
   A. Contingenten
   B. Cultuurstelsel
   C. Devide et Impera
   D. Gold, Glory, Gospel
   E. Verplichte leverantie

2. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, kepercayaan rakyat terhadap para penguasa lokal berkurang. Hal ini disebabkan oleh ....
   A. berlakunya konstitusi baru
   B. kuatnya dominasi pemerintah kolonial
   C. meleburnya kerajaan di bawah pemerintah kolonial
   D. penguasa lokal banyak yang berkhianat
   E. terjadinya politik adu domba

3. Gubernur Jenderal Belanda yang meletakkan dasar perubahan sistem hukum tradisional menjadi modern model Barat adalah ....
   A. Herman Willem Daendels
   B. Jan Willem Janssens
   C. Thomas Stamford Raffles
   D. van der Capellen
   E. van den Bosch

ISIAN

Tuliskan nama tokoh berikut!

Amati video di bawah ini!

Berdasarkan video di atas, silahkan klik di depan pernyataan yang tepat!

Organisasi Budi Utomo terpecah menjadi Budi Utomo Merah dan Putih.

Muhammadiyah merupakan organisasi yang berjuang di bidang perdagangan.

Tujuan organisasi Budi Utomo adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian.

MENJODOHKAN

Pasangkanlah pilihan yang tepat dengan menarik garis dari lajur kanan ke lajur kiri di bawah ini!

Organisasi Pendobrak	Parindra Gerindo GAPI
Organisasi Radikal	Budi Utomo Sarekat Islam Indische Partij
Organisasi Moderat	PI PNI PKI

SERET DAN LEPASKAN

Isilah bagian yang kosong berikut dengan cara menyeret dan melepaskan jawaban di bawahnya, sehingga menjadi kalimat yang benar!

KONSEP AMONG KI HAJAR DEWANTARA

Ing _____ sung tulodo, ing _____ mangun karsa, tut wuri _____

handayani | **madya** | **ngarso**